

## **BAB II**

### **SEJARAH, KEPENTINGAN SERTA ARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI DULU-SEKARANG, DAN RIWAYAT PERSETERUAN ARAB SAUDI-IRAN**

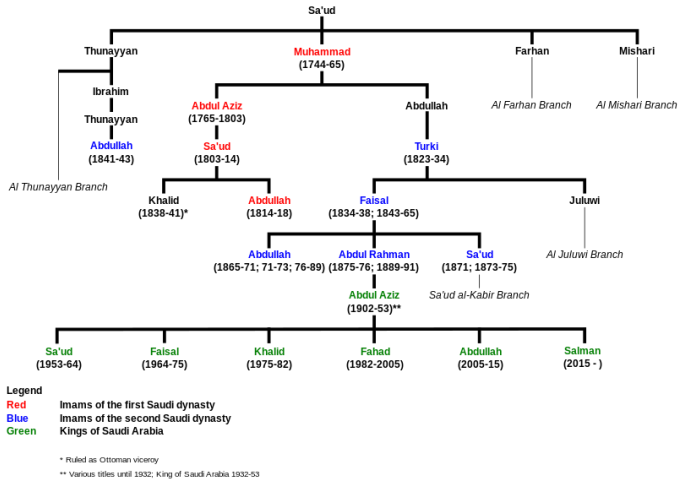
Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang profil Arab Saudi, sejarah, kepentingan serta arah kebijakan luar negeri oleh raja-raja sebelumnya hingga masa-masa pemerintahan saat ini yaitu Raja Muhammad bin Salman al-Saud, dan riwayat persetujuan Arab Saudi-Iran.

#### **A. Sejarah Berdirinya Kerajaan Arab Saudi**

*The House of Saud* pertama kali menampakkan dirinya pada tahun 1744 di Diriyah, sebuah wilayah kecil di tanah Arab Saudi yang kita kenal sekarang. Tepatnya ketika Muhammad bin Saud, seorang pangeran dari penguasa lokal padang pasir menikahi putri ulama konservatif Sunni, Muhammad bin Abdul Wahhāb. Pernikahan mereka menghasilkan negara Arab Saudi yang kita kenal sekarang, Saud menjadi *Emir*, dan Wahhāb menjadi *imam*. Bersama, mereka membawa paham Wahabi untuk memberantas paham-paham lain yang menurutnya menyimpang dari Islam sebenarnya, termasuk Syiah. Momentum ini dikatakan oleh Eammon Gaeron sebagai penanda titik balik sejarah Islam modern, Gaeron menyebutnya sebuah pakta yang menyatukan agama dan pemerintahan dimana visi politik Muhammad bin Saud bersatu dengan misi dakwah Muhammad bin Abdul Wahhāb melalui ikatan perjanjian pada tahun 1744. Pernyataan Gaeron tidak berlebihan mengingat setidaknya dua kali Dinasti Saud mengalami kehancuran dan bangkit kembali hingga menjadi negara kaya raya, penuh akan minyak, dan berteman baik dengan Amerika Serikat (Epimetheus, 2017).

Visi politik Muhammad bin Saudi menggiring kerajaan kecil di Diriyah tersebut melakukan ekspansi militer. Satu demi satu wilayah sekitar mereka taklukkan sampai tiba waktunya Ibn Saud meninggal pada 1765. Semangat perluasan wilayah Dinasti Saud kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad al-Saud yang berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Semenanjung Arabia. Tahun 1801 menjadi tahun terakhirnya menghembuskan nafas karena ia tewas dibunuh oleh seorang Syiah akibat penyerangannya terhadap kota suci Karbala yang meluluhlantakkan banyak korban sekaligus merusak situs-situs terhormat Syiah. Sepak terjang dinasti Saud menguasai wilayah suci Mekkah dan Madinah ternyata memancing dinasti Turki Ottoman untuk mengibarkan bendera perang, hasilnya terjadilah perang diantara keduanya pada kurun waktu 1811-1818 dan berakhir dengan kekalahan dinasti Saud (Gana Islamika, 2017, hal. 2). Namun, tidak semua keluarga Saud berhasil di bunuh. Pada tahun 1824, Dinasti Saud jilid II dibangun dari puing-puing oleh Turki bin Abdullah yang merupakan garis keturunan Muhammad bin Saud dari putra satunya yang bernama Abdullah (Gana Islamika, 2017, hal. 3).

*Gambar 2.1 Jumlah Korban Konflik Suriah*



Sumber: <https://ganaislamika.com/titik-balik-sejarah-islam-modern-3-bangkitnya-dinasti-saud-ii/>

Lain halnya dengan Dinasti Saud I yang jatuh akibat serangan dari luar, Dinasti Saud II tumbang justru karena perpecahan di dalam negeri. Terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara hingga Dinasti ini harus jatuh kedua kalinya. Klan Rasyid yang awalnya merupakan agen keluarga Saud lah yang berkhianat. Sejarah kemudian mencatat nama Muhammad bin Rasyid sebagai penguasa Riyadh (Gana Islamika, 2017, hal. 4).

Sejarah Arab Saudi modern dimulai ketika Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud bersama 39 orang pengikutnya secara heroik berhasil menaklukkan benteng Masmak, yang merupakan jantung kekuasaan Dinasti Al-Rasyid. Penaklukan ini secara otomatis menjadikan Abdul Aziz II penguasa Riyadh, dan dari sinilah awal mula Dinasti Saud pasca keruntuhan secara turun temurun memimpin wilayah yang hampir

mencakup keseluruhan Semenanjung Arabia atau Jazirah Arab dikemudian hari sampai sekarang (Gana Islamika, 2017, hal. 5).

Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Jazirah Arab, Abdul Aziz sangat berhati-hati dalam berpolitik baik ke dalam maupun ke luar. Saat itu, banyak kerajaan-kerajaan di tanah Arab mulai merasa tidak nyaman dengan status mereka sebagai bawahan Kekhalifahan Turki Ottoman yang menguasai hampir seluruh wilayah di Jazirah Arab. Mereka menganggap Turki Ottoman perlahan-lahan menjauhi nilai-nilai Islam, hal ini diperparah dengan munculnya sentimen nasionalisme Arab (Raditya, 2017).

Sementara itu, Abdul Aziz sibuk menyiapkan kekuatan militer, hasilnya pada tahun 1912, ia berhasil membangun koloni persaudaraan (Ikhwan) di gurun Al-Arṭāwīyyah. Barulah satu tahun kemudian ia mulai melakukan ekspansi, wilayah demi wilayah berhasil ditaklukkannya. Selain memiliki militer yang kuat, Abdul Aziz juga memiliki hubungan baik dengan negara-negara besar seperti Inggris serta Amerika Serikat. Inggris bahkan berperan aktif dalam penaklukan-penaklukan di wilayah Hejaz, Mekkah, Madinah, serta Pertempuran Damsyiq yang berhasil merebut wilayah Damaskus dari kekuasaan Turki Ottoman (Raditya, 2017). Akhirnya, pada tanggal 8 Januari 1926, Abdul Aziz memproklamasikan berdirinya negara Arab Saudi dengan nama resmi Kerajaan Arab Saudi atau *Al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Sa'ūdiyyah* (المملكة العربية السعودية) sekaligus menakhtakan dirinya menjadi raja pertama Arab Saudi (Gana Islamika, 2017, hal. 5).

## **B. Garis Besar Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi**

Konstitusi negara Arab Saudi adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang dasar Arab Saudi diadopsi dari dekret Raja Fahad bin Abdul Aziz al-Saud pada tahun 1992. Adapun bunyinya adalah raja harus tunduk dihadapan hukum Syariat Islam dan Al-Qur'an (Fanani, 2016).

Arab Saudi dengan stabilitas dan pengaruhnya, bekerja secara tekun merespon permasalahan-permasalahan yang ada di dunia regional sekaligus internasional. Kerajaan terlihat sangat percaya diri dalam urusan global dan selalu waspada terhadap keamanan nasionalnya sendiri. Kepercayaan diri tersebut datang karena beberapa faktor. Pertama, Arab Saudi merupakan negara tempat lahirnya Islam, agama dengan total pengikut lebih dari 1,2 miliar. Selain itu, mayoritas negara-negara Islam berada di kawasan Timur Tengah. Kedua, Arab Saudi merepresentasikan lebih dari 20% *Gross Domestic Product* (GDP) negara-negara Timur Tengah-Afrika Utara atau *Middle East-North Africa* (MENA). Lebih lanjut, di Dunia Arab GDP Arab Saudi diperkirakan mencapai seperempat total GDP Dunia Arab. Jika kita mengacu kepada data *Internasional Monetary Found* (IMF), saham perusahaan-perusahaan Saudi menguasai lebih dari 50% pasar wilayah MENA dan lima dari perusahaan Arab Saudi terdaftar dalam 10 perusahaan teratas Dunia Arab. Terakhir, perusahaan minyak milik kerajaan, Saudi Aramco merupakan produsen sekaligus eksportir minyak bumi terbesar di dunia dan menghasilkan total 12,5 juta barel perhari serta memiliki cadangan minyak sebesar 2.5 kita barel perhari atau setara dengan 70% cadangan minyak global (Middle East Policy Council, 2017).

Kebijakan luar negeri Arab Saudi seperti sempat disinggung pada bab sebelumnya, secara umum berfokus pada empat pilar utama, integritas wilayah, perlindungan rezim, kemakmuran ekonomi, dan promosi serta pelestarian bentuk pemerintahan monarki Islam. Oleh sebab itu, Arab Saudi memfokuskan langkah-langkahnya untuk memperkuat sekutu di seluruh dunia dan kawasan dengan cara apapun. Pada pelaksanaannya Arab Saudi selalu mengandalkan *checkbox diplomacy* dan bantuan Amerika Serikat. *Checkbox diplomacy* merupakan kebijakan luar negeri yang secara terbuka mengandalkan pemberian bantuan ekonomi dalam upaya negara untuk mencapai *diplomatic favor* (pertolongan diplomatik). Kekayaan minyak yang berlimpah membuat Arab Saudi tidak segan ‘membeli’ *diplomatic favor* dari negara-negara lain bahkan musuhnya

sekalipun. Tidak jarang usaha membeli musuh malah berbalik menjadi bumerang (Al-Shihabi, 2017).

Arab Saudi secara tegas percaya bahwa perdamaian kawasan harus menjadi fokus utama. Perdamaian hanya dapat dicapai apabila negara-negara dikawasan sepakat mengintegrasikan diri dalam skema kerja sama yang dibangun atas dasar kepercayaan melalui dialog, dan keterlibatan. Inilah mengapa Arab Saudi akan terus berperan aktif dalam memimpin negosiasi maupun inisiasi pada setiap konflik maupun isu-isu di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya kerajaan yakin keamanan serta stabilitas rezim negara akan membawa keberlangsungan yang baik terhadap kemajuan ekonomi, politik, dan sosial masyarakat sehingga perdamaian dapat tercapai. Tidak adanya konflik akan membukakan gerbang menuju kemakmuran negara (Middle East Policy Council, 2017).

Di bawah kepemimpinan Raja Salman, 2 dari 3 tujuan strategisnya berkaitan dengan kebijakan luar negeri. 1.) Memperkuat militer, 2.) Mengevaluasi aliansi, dan 3.) Secara agresif menahan ekspansi kekuatan Iran dalam rangka meraih hegemoni kawasan.

### **C. Perseteruan Arab Saudi-Iran**

Salah satu masalah yang dapat mengganggu kebijakan luar negeri Arab Saudi di atas adalah Iran, negara Syiah terbesar di dunia. Secara khusus, Arab Saudi-Iran memiliki hubungan bilateral yang rumit. Meskipun keduanya sama-sama merupakan negara Islam. Bagi Arab Saudi, Iran pasca revolusi yang telah mengambil sikap petarung terutama terhadap dunia Barat, menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap dunia, bertolak belakang dengan sikap Arab Saudi selama ini. Perlu diperhatikan bahwa Iran memiliki cadangan minyak bumi terbesar kedua setelah Arab Saudi, dan mereka memiliki komunitas muslim yang besar. Sehingga Iran tidak hanya menggambarkan diri mereka sebagai pemimpin Syiah tapi sekaligus seluruh kaum revolusioner muslim yang berdiri

melawan dunia Barat. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tadi, hal yang paling dikhawatirkan Arab Saudi adalah program pengembangan nuklir milik Iran (Middle East Policy Council, 2017) yang dapat mengganggu perdamaian regional. Raja Abdullah pernah mengancam keras Iran dengan menyebutnya negara yang tidak layak ada di dunia karena mengembangkan senjata nuklir, ia bahkan mengibaratkan Iran layaknya kepala ular yang harus dipotong (BBC, 2010).

Campur tangan Iran di negara-negara Syiah seperti Irak, dan Bahrain, atau negara-negara dengan komunitas Syiah yang signifikan seperti Kuwait, Lebanon, dan Yaman, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Arab Saudi. Menurutnya, Iran tidak berhak mencampuri urusan internal negara lain. Perlu di garis bawahi, Iran memang mengambil peran seperti itu, berperan aktif dalam setiap isu di kawasan Timur Tengah. Iran jelas memiliki keinginan memimpin atau menjadi yang terdepan bagi umat muslim (Middle East Policy Council, 2017).

## **1. Perang Iran-Irak**

Perang Iran-Irak dimulai pada tanggal 22 September 1980, ketika pasukan bersenjata Irak menyerbu perbatasan Iran Barat di Khuzestan dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 1988 dengan gencatan senjata melalui Resolusi 598 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang memutuskan *status quo ante*<sup>1</sup>. Pemimpin Iraq saat itu, Saddam Hussein ingin menguasai dan mengontrol Sungai Shatt al-Arab yang merupakan pembatas kedua negara. Sungai Shatt al-Arab adalah tempat bertemunya sungai Efrat dan sungai Tigris. Masalahnya, kedua negara sama-sama mengklaim wilayah ini. Bagi Irak, Sungai Shatt al-Arab sangat vital keberadaannya karena merupakan satu-satunya akses Irak menuju air di Teluk Persia. Penyerbuan Irak dilakukan karena berbagai alasan, pada saat itu mayoritas Syiah di Irak dihasut oleh pemerintahan

---

<sup>1</sup> Keadaan sebagaimana sebelum adanya perang. Artinya wilayah Sungai Shatt al-Arab tetap menjadi milik Iran.

revolusioner Iran untuk memberontak di Irak sehingga Saddam geram dengan Iran, kemudian atas revolusi itu juga Iran mulai diasingkan di dunia internasional terutama karena perselisihannya dengan Amerika Serikat yang mengakibatkan Iran sendirian di dunia internasional tanpa sekutu (History, 2015).

Selama perang berlangsung, kedua negara-negara sama-sama mendapat bantuan dari negara lain. Walaupun berada pada posisi terisolasi, Iran mendapat bantuan logistik sekaligus persenjataan dari Suriah, Libya, dan Korea Utara (Stern, t.thn.). Sedangkan Irak berhasil mendapat bantuan dari berbagai kekuatan asing, kebanyakan datang dari Arab Saudi. Bantuan dana sebesar US\$25 miliar dikururkan Arab Saudi untuk mendukung Irak di perang Iran-Irak, menegaskan hubungan kedua negara yang pada masa itu sama-sama merasa terancam terhadap revolusi Iran. Ketakutan tersebut memupuk hubungan kerja sama yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun pada akhirnya Arab Saudi sendirilah yang meminta bantuan Amerika Serikat untuk mengakhiri Perang Iran-Irak karena pada bulan Agustus 1990, pasukan Irak mulai menyerbut Kuwait dan membahayakan keamanan Arab Saudi serta kawasan Timur Tengah (ShiiteNEWS, 2017).

## **2. Perang Saudara Yaman**

Yaman adalah negara terpadat kedua di Semenanjung Arabia. Memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan sumber yang terbatas membuat Yaman seringkali menjadi wadah konflik. Revolusi Yaman yang merupakan bagian dari *Arab Spring* terjadi setelah Revolusi Tunisia dibarengi Revolusi Mesir (Fanani, 2016, hal. 15).

Demonstran menuntut penyediaan lapangan kerja, memprotes kondisi ekonomi yang buruk serta maraknya korupsi, dan menolak usulan pemerintah untuk mengubah konstitusi Yaman. Total ada lebih dari 16.000 demonstran memusatkan diri di Sana'a, ibu kota Yaman, pada tanggal 27



Januari 2011, meminta Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri dari jabatannya. Saleh kemudian merespon dengan cepat dan mengumumkan bahwa ia tidak akan mengikuti pemilihan Presiden tahun 2013 pada tanggal 2 Februari. Namun, demonstrasi tidak berhenti sampai di situ dan terus berlanjut. Pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2011, para demonstran menyuarkan pengusiran Saleh di Sana'a yang berujung jatuhnya korban sebanyak 3 orang. Lalu, pada tanggal 18 Maret 2011, sebanyak 52 orang demonstran meninggal setelah ditembak oleh pemerintah (Fanani, 2016, hal. 15-16).

Konflik semakin memanas ketika pihak oposisi mengebom istana Presiden pada tanggal 3 Juni 2011, setidaknya ada lima orang meninggal dan Saleh ikut terluka. Sehari setelahnya, pemerintahan diambil alih oleh Wakil Presiden Abdul Rab Mansul al-Hadi, dan Saleh dilarikan ke Arab Saudi untuk mendapat perawatan. Tidak puas hanya sampai disitu, pemilu kemudian diadakan pada tanggal 21 Februari 2011 di Yaman dengan hasil 99,8% suara dimenangkan oleh Hadi. Baru setelah itu, pada tanggal 25 Februari 2012, Abdul Rab Mansul al-Hadi resmi dilantik sebagai Presiden baru Yaman, mengakhiri 33 tahun masa pemerintahan Saleh (Fanani, 2016, hal. 17).

Ternyata konflik di Yaman tidak berhenti sampai disitu. Selama masa pemerintahan Hadi, terjadi perpecahan internal mulai dari gerakan separatis al-Qaeda di wilayah Selatan, kelompok Houthi di Yaman Utara, faksi-faksi di dalam tubuh militer dan ditambah simpatisan-simpatisan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Terhitung dari periode 2012-2014 terjadi banyak guncangan-guncangan yang menyudutkan pemerintah, sebut saja bom bunuh diri, protes harga bahan bakar minyak, dan berbagai penyerangan menjadi penanda konflik pada periode tersebut (Fanani, 2016, hal. 17-19). Bahkan Perang Saudara kemudian benar-benar meletus pada tahun 2015, bermula dari pendudukan ibu kota Yaman oleh kelompok Houthi, dimana Houthi mendapatkan kontrol absolut setelah mantan Presiden Ali Abdullah Saleh di tembak mati oleh seorang *sniper* Houthi pada Pertempuran Sana'a. Sampai saat

ini perang masih berlangsung dan pertempuran terakhir terjadi di Hudaydah, atau *The Battle of Hudaydah III*<sup>2</sup> yang terjadi pada kurun waktu 1-13 Nopember 2018 kemarin (BBC UK, 2018).

Perubahan rezim di Yaman, secara tidak langsung akan menguatkan Iran dan melemahkan Arab Saudi. Yaman sebelumnya merupakan daerah yang berada di bawah pengaruh Arab Saudi, sedangkan Houthi didukung oleh Iran melalui pemberian senjata canggih serta pengiriman penasehat militer. Houthi adalah organisasi yang menganut paham Zaidi, salah satu cabang dari Syiah (Saul, Hafezi, & Georgy, 2017).

Keterlibatan Arab Saudi pada Perang Saudara Yaman dimulai dari Maret tahun 2015, Arab Saudi memimpin koalisi mengebom pemberontak Houthi. Angkatan Udara Saudi dikerahkan untuk merebut kembali ibu kota Sana'a dari Houthi yang mereka anggap sebagai proksi Iran. Sejak saat itu Arab Saudi telah mengerahkan lebih dari 100 jet tempur dan 150.000 Angkatan Darat serta Angkatan Laut demi mempertahankan pemerintahan Yaman di tengah gempuran Houthi (Associated Press The Guardian, 2015). Terakhir, pada tanggal 4 Nopember 2017, militansi Houthi melancarkan serangan rudal ke Bandara Riyadh, namun Arab Saudi berhasil menggagalkan serangan tersebut dengan sistem pertahanan anti rudal buatan Amerika Serikat (BBC, 2017).

### **3. Perselisihan Arab Saudi-Lebanon**

Perselisihan berawal pada saat Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri pada tanggal 4 Nopember 2017 ketika ia berada di Riyadh, Arab Saudi. "Kita hidup disuasana serupa, dalam atmosfer yang terasa sebelum pembunuhan martir Rafik al-Hariri. Saya merasakan ada rencana sembunyi-sembunyi

---

<sup>2</sup> Sebelumnya telah terjadi *The Battle of Hudaydah I* (13-22 Juni 2018) dan II (9-16 September 2018)

untuk mengincar nyawa saya”, Kata Saad al-Hariri di Riyadh (BBC, 2017). Pernyataan itu lantas membuat hubungan luar negeri Arab Saudi-Lebanon memanas. Apalagi waktu pernyataan pengunduran diri itu berbarengan dengan pembersihan serangan rudal militansi Houthi ke Bandara Riyadh yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Banyak analis yang berpendapat bahwa pernyataan Hariri disampaikan karena adanya paksaan dari Arab Saudi untuk mencari dalih menyatakan perang terhadap militansi Hizbullah yang dituduh sebagai proksi Iran di Lebanon. Arab Saudi justru mengklaim pemerintah Lebanon yang dipengaruhi oleh Hizbullah menyatakan perang kepada Arab Saudi. Begitu juga sebaliknya, kelompok Hizbullah, melalui Hassan Nasrallah mengatakan Arab Saudi telah menyatakan perang terhadap Lebanon dan Hizbullah. (Muñoz, 2017).

#### **4. Krisis Diplomatik Qatar**

Pada tahun 2017, secara mengejutkan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik ini memang bukan yang pertama, mengingat pada tahun 2014 Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya pernah membekukan hubungan mereka dengan Qatar selama delapan bulan. Padahal kedua negara memiliki banyak kesamaan dari latar belakang penduduk yang merupakan sama-sama penganut Sunni, terlebih kedua negara berbatasan langsung dan sama-sama berada di Teluk Persia. Kedua negara juga tergabung dalam Liga Arab (Pratiwi, 2018, hal. 4).

Keputusan Arab Saudi ternyata dilatarbelakangi perilaku Qatar yang disebut berhubungan dengan terorisme. Qatar dituding menyokong pendanaan Ikhwanul Muslimin di Mesir, berhubungan dekat dengan Taliban, dan kelompok-kelompok afiliasi Al-Qaeda. Tidak hanya sampai disitu, stasiun televisi Al-Jazeera yang berpusat di Doha pun dituduh mendanai kubu pemberontak Houthi di Yaman. Apalagi Qatar mendukung pengayaan uranium milik Iran, hal ini tentu saja

mengkhawatirkan bagi Arab Saudi mengingat perkembangan program nuklir Iran sama dengan ancaman terhadap kestabilan keamanan di kawasan Timur Tengah (Pratiwi, 2018, hal. 7).